

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada publik, khususnya pelayanan untuk peserta didik yang menuntut pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran.

Para pakar pendidikan menyatakan bahwa fungsi utama sekolah adalah pembinaan dan pengembangan semua potensi individu terutama pengembangan potensi fisik, intelektual dan moral setiap peserta didik. Maka sekolah harus dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan formal untuk mengembangkan semua potensi peserta didik sebagai sumber daya manusia.¹ Pendidikan merupakan investasi yang paling utama bagi bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang. Pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan untuk itu melalui pendidikan.² Pendidikan merupakan senjata bagi kemajuan bangsa. Jika pendidikan suatu bangsa baik maka baik pulalah generasi penerusnya. Sementara itu, baik atau tidaknya pendidikan di suatu bangsa dapat dilihat dari pelaksanaan serta orientasi sistem

¹ Achmad Sugandi, dkk, *Teori Pembelajaran*, (Semarang: UPT UNNES PRESS, 2005), hlm. 51

² Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.2

pendidikan tersebut. Semakin jelas pendidikan itu, maka semakin tampak pula perkembangan dan kemajuan suatu bangsa.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan pasal 3 UU Sisdiknas tahun 2003 tentang pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Dari strategi pembangunan sekolah diatas, secara fisik barang kali keberhasilannya lebih ditentukan kepada peran birokrat atau aparat pemerintah, namun keberhasilan pendidikan secara berkualitas akan lebih banyak tergantung pada peran tenaga pendidik dan penyelenggara sekolah itu sendiri, karena bagaimanapun bagusnya sekolah, canggihnya peralatan penunjang pembelajaran yang tersedia, jika tenaga pendidik tidak mampu, maka resiko kegagalan pun akan sangat tinggi.

Sementara itu, pendidikan nasional kita hadapi kepada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip

³ *Undang-Undang Sisdiknas 2003*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 5

pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.⁴

Terkait dengan hal diatas, proses pendidikan untuk menghasilkan *out put* yang berkualitas tidak terjadi begitu saja dalam suatu lembaga pendidikan. Tetapi ini memerlukan suatu yang efektif dan efisien. Kualitas yang baik dalam suatu lembaga pendidikan ditentukan oleh suatu perencanaan yang baik dalam suatu manajemen. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan yang baik dalam suatu lembaga pendidikan supaya menghasilkan *out put* yang berkualitas dibutuhkan pengelolaan manajemen yang baik.

Dalam Al- Qur'an Surat Al-Furqan ayat 67, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ

ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.⁵

Dalil tersebut menerangkan bahwa hamba Allah yang benar-benar mukmin tidak akan melampaui batas dalam

⁴ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 78

⁵ Al- Aliyy, *Al- qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 291

mengeluarkan hartanya dan tidak pula berlaku kikir terhadap diri ataupun terhadap keluarga. Mereka mengeluarkan nafkah secara seimbang, tidak melampaui batas dan tidak pula sangat kurang dari batas.⁶

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan, tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di semua lembaga pendidikan atau institusi yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Maksud efektif dan efisien adalah berhasil guna dan berdaya guna. Artinya, bahwa manajemen yang berhasil mencapai tujuan dengan penghematan tenaga, waktu, dan biaya.

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki lembaga pendidikan sekolah agar dapat mencetak anak didik yang baik yakni dari segi keuangan. Manajemen keuangan sekolah sangat penting perannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Ada beberapa sumber dana yang diperoleh sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak lain masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur. Sistem pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik

⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash- Shiddieqy, *Tafsir Al- Qur'anul Majid An- Nuur*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2000), hlm. 2909

oleh semua pihak sekolah, hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan sekolah lain. Besar kecil adanya keragaman ini bergantung pada tiap sekolah, letak sekolah, dan julukan sekolah.

Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggung jawaban. Untuk melaksanakan sesuatu dengan tertib, teratur, dan terarah diperlukan adanya manajemen. Manajemen merupakan seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Berdasarkan kenyataan manajemen mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain.⁷

Sementara itu dalam konteks Indonesia, terkait dengan alokasi biaya pendidikan tersebut, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan; biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan; dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan mencakup biaya investasi (lahan dan selain lahan pendidikan), biaya operasi

⁷ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, cet, 3) hlm. 3

(personalia dan nonpersonalia), bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Sedangkan biaya penyelenggaraan pendidikan mencakup biaya investasi (lahan dan selain lahan), biaya operasi (personalia dan nonpersonalia).⁸

Penerapan peraturan dan sistem manajemen keuangan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen keuangan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis di dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata pamong yang baik (*good governance*), sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan.

Di dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian aktifitas terdiri dari perencanaan program keuangan, perkiraan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah. Keuangan yang terdiri atas dana investasi, dana operasi dan dana personal. Dana investasi meliputi dana penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Adapun dana personal mencakup dana-dana pendidikan yang harus dikeluarkan

⁸ Fachrurrozi, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana; untuk Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah Aliyah (Pesantren) di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), hlm. 21-22

oleh peserta didik untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan dana operasi pendidikan mencakup :

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
3. Dana operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi dan lain-lain.⁹

SMK Syafi'i Akrom adalah lembaga pendidikan yang senantiasa konsisten berusaha membentuk peserta didik menjadi insan yang berilmu, terampil, cerdas namun juga berakhlaqul karimah. Selalu menumbuhkan keyakinan bahwa dimanapun berada Allah SWT senantiasa maha mengetahui perbuatan hamba-Nya. Manajemen keuangan di SMK Syafi'i Akrom melibatkan pimpinan beserta tenaga ahli dalam bidang keuangan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah sehingga menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Sistem manajemen keuangan tersebut telah menunjukkan banyak perubahan dari tahun ke tahun, sebagaimana tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai di dukung adanya tenaga pendidik dan tenaga ahli yang

⁹ Khaeruddin dan Mahfud Junaidi dkk, *Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan: Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007), hlm. 67

profesional, sehingga dapat menghasilkan *out put* yang berkualitas. Melihat banyaknya minat masyarakat yang menginginkan anaknya megenyam pendidikan di SMK Syafi'i Akrom.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMK Syafi'i Akrom Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penganggaran di SMK Syafi'i Akrom Pekalongan?
2. Bagaimana pelaksanaan keuangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Syafi'i Akrom Pekalongan?
3. Bagaimana *auditing* keuangan di SMK Syafi'i Akrom Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penganggaran di SMK Syafi'i Akrom Pekalongan

2. Untuk mengetahui pelaksanaan keuangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Syafi'i Akrom Pekalongan
3. Untuk mengetahui *auditing* keuangan di SMK Syafi'i Akrom Pekalongan

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Memberikan pengetahuan kepada para pembaca, khususnya teman-teman jurusan Kependidikan Islam agar mengetahui bagaimana peranan penting manajemen keuangan dalam dunia pendidikan
2. Memberikan nilai tambah untuk lembaga dalam hal pencitraan lembaga dengan harapan bisa berdampak pada peningkatan kualitas organisasi pendidikan bersangkutan.
3. Serta untuk peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama atau dengan metode yang sama.
4. Secara praktis manfaat penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi program sarjana IAIN Walisongo Semarang sebagai syarat kelulusan.